

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang diawali pada tahun 1998 dengan tergesernya paradigma desentralisasi administratif, yang dianut Orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU 22 Tahun 1999. Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik, oleh pemerintah pusat, di daerah. Menurut Simanjuntak (2013:109) Meraknya pemekaran yang berlangsung sejak undang-undang tentang pemerintahan daerah dijalankan membuat daerah-daerah bergegas dan mengambil kesempatan untuk mengejar ketertinggalan daerah- daerah.

Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah.

Kebijakan pemekaran daerah pasca ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasarkan UU No.5 Tahun 1975. Kebijakan pemekaran daerah pada orde baru, memang bersifat elitis dan memiliki karakter sentralistis, yang perencanaan dan implementasi pemekaran lebih merupakan inisiatif pemerintah pusat. Proses pemekaran daerah sering kali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas dikalangan pemerintah

pusat. Setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa pembangunan didaerahnya masih tertinggal, dan menginginkan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan di semua wilayah, sementara potensi yang dimiliki wilayah memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang, maka dibentuk Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-undang No 9 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sehingga menjamin perkembangan kemajuan di masa yang akan datang. Dilihat dari segi potensi sumber daya alamnya, wilayah yang masuk Kabupaten Pakpak Bharat banyak menghasilkan komoditi Kemenyan dan Nilam. Dimana kita ketahui bahwasanya komoditi ini merupakan salah satu sumber pendapatan wilayah tersebut. Sedangkan dari sumber daya manusianya, terlihat bahwa masyarakat pakpak sudah memiliki potensi untuk mengembangkan wilayah, dimana dari tingkat pendidikan sudah banyak yang mengenyam pendidikan sarjana dan telah siap mengabdikan untuk wilayah Pakpak Bharat tersebut.

Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri hasil dari pemekaran Kabupaten

Dairi. Sejak terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat Bupati dan Aparatur pemerintahan selangkah demi selangkah mulai melakukan pembangunan di berbagai sektor yaitu pembangunan sarana umum dan perkantoran. Keadaan pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi. Dengan demikian peneliti mengangkat judul Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2003-2016 di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dilatar belakang diatas ,maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut :

1. Latar belakang pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
2. Kebijakan pemerintah dalam pemekaran daerah di Indonseia
3. Kondisi ekonomi, pendidikan dan infrastruktur Kabupaten Pakpak Bharat sebelum pemekaran wilayah
4. Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
5. Proses pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat dari Kabupaten Dairi
6. Kondisi ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur Kabupaten Pakpak Bharat sesudah pemekaran wilayah
7. Kesejahteraan masyarakat daerah dibawah kekuasaan pemerintahan daerah

1.3.Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian masalah pada identifikasi masalah , peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah yang terbatas pada :

1. Latar belakang pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
2. Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
3. Proses terjadinya pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
4. Kondisi Pakpak Bharat sebelum dan sesudah terpisah dari kabupaten Dairi

1.4. Rumusan Msalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Latar belakang pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
2. Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat?
3. Bagaimana proses terjadinya pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat?
4. Bagaimana kondisi Pakpak Bharat sebelum dan sesudah terpisah dari kabupaten Dairi?

1.5.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Untuk mengetahui proses terjadinya pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat
4. Untuk mengetahui Kondisi Pakpak Bharat sebelum dan sesudah terpisah dari kabupaten Dairi

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang proses pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat .
2. Sebagai perbandingan bagi mahasiswa pendidikan sejarah maupun bagi jurusan lainnya dengan bidang penelitian yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang sempurna.
3. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat didalam pengetahuan mengenai perkembangan daerah Kabupaten Pakpak Bhara sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi
4. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang relevan dengan topik penelitian